

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN MELALUI BELANJA TIDAK LANGSUNG PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

Ni Luh Gede Cintya Adriani¹
I Nyoman Mahaendra Yasa²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: cintya_adriani@yahoo.com

Abstrak

Tingkat pengangguran merupakan masalah yang dialami di setiap daerah, termasuk pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pesatnya pembangunan diharapkan berdampak kepada capaian penurunan tingkat pengangguran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh langsung dan tidak langsung antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap tingkat pengangguran melalui belanja tidak langsung. Penelitian ini dilakukan pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang terdapat di BPS Provinsi Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sedangkan metode analisisnya analisis jalur atau *path analysis* untuk mengetahui pengaruh langsung serta uji sobel untuk mengetahui pengaruh tidak langsung. Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap belanja tidak langsung. PAD dan dana perimbangan berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran dan belanja tidak langsung berpengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Melalui belanja tidak langsung PAD dan dana perimbangan berpengaruh tidak langsung signifikan terhadap tingkat pengangguran. Berarti belanja tidak langsung merupakan variabel intervening dari PAD dan dana perimbangan.

Kata kunci: Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja tidak langsung, tingkat pengangguran.

Abstract

The unemployment rate is a problem experienced in each area, including at the district / city in the province of Bali. The rapid development is expected to impact the achievement of a decrease in the unemployment rate. This study aimed to investigate the effect of direct and indirect between local revenues and equalization funds against unemployment through indirect expenditures. This research was conducted in all districts / cities in the province Bali. Data collection is done through the documents contained in the BPS Bali Province. The data used in this research is secondary data, while the method of analysis or path analysis path analysis to determine the direct effect as well as Sobel test to determine the effect is not immediate. The analysis showed that the PAD and the balance funds have positive and significant direct effect on the indirect spending. PAD and fund balance of positive and significant direct effect on the unemployment rate and indirect expenditures and significant negative direct effect on the unemployment rate. PAD through indirect expenditures and fund balance significant indirect effect on the unemployment rate. Langgung not mean spending an intervening variable of PAD and the balance funds.

Keywords: local revenue, equalization funds, indirect expenditure, the unemployment rate.

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara yang sedang berkembang yang masih memiliki masalah pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah telah melakukan banyak usaha sehingga dapat mengatasi masalah pengangguran, akan tetapi masih banyak jumlah masyarakat miskin dan terjadi pelonjakan jumlah pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran sangat erat kaitannya, dimana banyaknya jumlah penduduk miskin menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan, karena sebagian orang tua lebih memilih untuk mempekerjakan anaknya dari pada bersekolah yang hanya menghabiskan biaya. Menurut Sopianti dan Ayuningsasi (2013), dalam suatu Negara untuk melihat pembangunan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian, melalui tingkat pengangguran merupakan salah satunya.

Pemerintah telah mengalokasikan dana untuk melaksanakan kegiatan guna mensejahterakan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat diperlukan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran, sehingga akan meningkatkan pendapatan di daerah. Akan tetapi hal tersebut tidak selalu beriringan menurut Santosa (2013), peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak akan selalu diikuti oleh peningkatan pendapatan, sehingga tidak akan dapat diiringi oleh penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Hal serupa juga dinyatakan dari penelitian Lin *and* Liu (2000) serta Mahyuddin (2009) yang menyatakan, dampak positif pertumbuhan ekonomi berasal dari desentralisasi fiskal serta layanan jasa masyarakat.

Menurut Jhingan (2000:694), yang didukung penelitian Karanassou *et al* (1997), Syamsuddin dan Setyawan (2008), perencanaan pembangunan

mempertimbangkan semua potensi ekonomi yang paling penting seperti tabungan total, investasi, output, pengeluaran pemerintah dan transaksi luar negeri (ekspor impor), serta menyerap tenaga kerja. Masalah pembangunan ekonomi seperti ketenagakerjaan adalah salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia, yang terlebih lagi saat mengalami krisis multidimensi yang dimana krisis ini membawa Indonesia mengalami kemerosotan ekonomi, politik, moral, dan sosial (Subandi, 2008:109). Menurut Hakim (2002:128), perencanaan pembangunan sudah dipandang bisa sebagai panduan atau panutan untuk hasil suatu pembangunan yang lebih baik, bahkan sudah dianggap sebagai jalur yang harus dilakukan dalam sebuah perekonomian apabila menginginkan keberhasilan yang baik. Oleh karena itu pentingnya suatu perencanaan pembangunan yang matang demi peningkatan kesejahteraan yang lebih baik nantinya.

Perencanaan pembangunan perekonomian di Indonesia sangat erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi di daerah, oleh karena daerah yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi tersebut. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah berperan sangat penting, selain itu adanya sektor swasta juga dapat menjalin kerjasama demi meningkatkan lapangan pekerjaan, sehingga akan banyak terserap tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran. Pembangunan ekonomi daerah tidak lepas dari adanya Undang-Undang. Pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 bahwa, pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada daerah untuk mengatur daerahnya dan disebut juga dengan otonomi daerah. Menurut Maimunah (2006), otonomi daerah adalah suatu hak dan tanggung jawab, juga kewajiban

daerahotonom agar dapat menyusun dan mengurus sendiri urusan pemerintah serta kebutuhan masyarakat setempat sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Subandi (2008:133), yang didukung penelian Nugraeni (2011), suatu rangkaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat sehingga dapat mengelola sumber daya atau potensi pada daerah masing-masing, merupakan kegiatan pembangunan di daerahnya masing-masing, dan membentuk kerjasama dengan sektor swasta sehingga akan terciptanya lapangan pekerjaan baru yang dapat meningkatkan perkembangan dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perekonomian atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

Menurut Subandi (2008:134-135), dalam pembangunan ekonomi daerah terdapat beberapa masalah, yaitu: *Pertama*, adanya ketimpangan permasalahan sektor industri, dimana pertumbuhan ekonomi yang di kota akan cenderung lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi di desa, karena di desa pembangunan ekonominya lebih rendah, dan lebih terfokus pada pertanian. Hal ini yang membuat perkembangan industri di kota lebih pesat. *Kedua*, kurang meratanya investasi, menurut Harrod-Domar (Subandi, 2008:134), terdapat hubungan positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, kurangnya investasi di suatu daerah berdampak mengurangi pertumbuhan dan pendapatan per kapita masyarakat di daerah tersebut. *Ketiga*, adanya tingkat pergerakan faktor produksi yang rendah, kurang lancarnya pergerakan faktor produksi seperti pada tenaga kerja dan kapasitas antar daerah yang juga penyebab terjadinya ketimpangan

ekonomi regional, yang disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah. *Keempat*, adanya perbedaan sumber daya alam dimana setiap daerah memiliki sumberdaya yang berbeda-beda, dikatakan bahwa daerah yang memiliki sumberdaya alam yang banyak akan lebih maju, tetapi dengan adanya perkembangan zaman hal itu harus saling beriringan karena dengan adanya sumber daya alam yang besar belum tentu daerah tersebut dapat berkembang dengan baik haruslah adanya penyeimbang dari bantuan teknologi dan sumber daya manusia pula. *Kelima*, adanya perbedaan tingkat demografis juga mempengaruhi adanya ketimpangan ekonomi regional seperti meningkatnya jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, kedisiplinan, serta adanya perbedaan nilai kerja. Apabila semua hal itu baik dan positif, maka akan menjadi suatu aset penting demi meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan apabila sebaliknya, maka akan menyebabkan adanya masalah seperti adanya pengangguran dan kemiskinan. *Keenam*, kurang lancarnya perdagangan antar daerah, ketidaklancaran perdagangan antar daerah akan mempengaruhi dibidang permintaan dan penawaran serta akan menyebabkan adanya ketimpangan ekonomi. Permasalahan tersebut akan berdampak pada pengangguran dan kemiskinan yang sampai saat ini tidak hanya terjadi di daerah dan di Indonesia, tetapi ini juga terjadi di seluruh dunia.

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peran pemerintah dengan program-programnya yang ingin mensejahterakan rakyat. Adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi pula, maka disinilah peran otonomi daerah yang dapat

memperdayakan potensi daerah masing-masing, serta adanya tabungan masyarakat, bertambahnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja dari peningkatan angkatan kerja dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan juga adanya penyempurnaan teknologi dalam proses produksi. PAD yang tinggi merupakan tujuan dari semua pemerintah daerah. PAD yang tinggi menandakan otonomi daerah yang dilaksanakan berjalan dengan baik. PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari hasil pengelolaan potensi-potensi yang ada di daerah oleh pemerintah daerah dengan bantuan masyarakat setempat dan dari pihak swasta.

Setiap daerah memiliki PAD berbeda-beda karena potensi yang dimiliki setiap daerah berbeda. Semakin tingginya PAD suatu daerah dapat mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan oleh pemerintah pusat, sesuai Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Penentuan pajak terhadap PAD ditentukan sendiri oleh daerah yang bersangkutan, namun masih selaras dengan ketentuan Undang-Undang. PAD ditentukan dari obyek pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat apabila PAD meningkat dan kesejahteraan masyarakat daerah meningkat.

Hasil survei dari BPS (2014) menyatakan, PAD di Provinsi Bali berbeda-beda di tiap daerahnya, sudah tentu karena potensi daerahnya berbeda-beda. Provinsi Bali sudah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dari tahun ke tahun selalu disertai peningkatan dalam PAD terutama

di daerah yang perkembangannya di bidang jasa pariwisata tergolong sangat pesat. Tingkat PAD sebesar 2,53 triliun dari penerimaan daerah sebesar 4,11 triliun, yang dimiliki oleh Kabupaten Badung pada Tahun 2013. Upaya peningkatan PAD merupakan tujuan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan PAD akan disertai peningkatan anggaran pengeluaran daerah. Belanja daerah yaitu seluruh pengeluaran yang berasal dari pemerintah daerah pada satu periode anggaran yang dipergunakan untuk memenuhi kewajiban, serta tanggung jawab terhadap seluruh pihak yang terkait. Belanja daerah cenderung memiliki kekurangan dalam pembiayaannya, karena anggaran APBN dan APBD yang akan diterima daerah. Belanja daerah dapat dibagi menjadi beberapa jenis belanja daerah seperti belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Tercatat dalam belanja daerah pengeluaran tertinggi digunakan untuk belanja tidak langsung daerah Bali Tahun 2014 yang mencapai 67,40 persen dari total Belanja tidak langsung dan sisanya sebanyak Rp 1,26 triliun (32,60 persen) digunakan untuk belanja langsung (BPS Provinsi Bali, 2014). Perlunya peningkatan PAD akan mempengaruhi tingkat belanja daerah, sehingga pengalokasian untuk kesejahteraan masyarakat juga meningkat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akan mengurangi kesenjangan masyarakat dalam hal mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Menurut Setyawati dan Hamzah (2007), meningkatnya PAD akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, untuk itu perlu adanya pengaruh dalam belanja pembangunan (Belanja Tidak Langsung), sehingga dapat menekan jumlah pengangguran. Hal inilah yang membuat keterkaitan PAD dengan belanja daerah

sangat erat, karena semakin besar PAD akan membuat belanja daerah juga meningkat dan akan lebih banyak pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat. Kondisi pengangguran terbuka di Provinsi Bali terjabar dalam Tabel 1.

Table 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2007-2013 (dalam %)

Kabupaten/Kota	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jembrana	3,90	4,10	2,23	2,54	2,17	1,76	3,39
Tabanan	2,10	2,80	2,73	1,07	1,80	2,22	0,79
Badung	4,50	3,20	3,20	1,25	2,30	1,60	0,77
Gianyar	2,80	2,80	2,91	2,36	2,16	1,72	2,16
Klungkung	6,80	4,00	3,73	3,59	1,78	2,05	2,12
Bangli	1,40	2,60	1,42	0,65	1,00	0,95	0,75
Karangasem	3,30	3,20	3,32	2,82	1,99	1,34	1,34
Buleleng	4,00	2,90	2,34	3,26	1,97	3,15	2,13
Kota Denpasar	5,40	4,41	5,19	6,57	3,69	2,41	2,64
Provinsi Bali	3,77	3,31	3,13	3,08	2,32	2,04	1,79
Nasional	9,11	8,39	7,87	7,14	6,56	6,14	6,29

Sumber: BPS Provinsi Bali dan Nasional, 2014

Pada Tabel 1, tampak bahwa di tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali mencapai angka 1,79 persen, terendah jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat pengangguran terbuka nasional yang mencapai angka 6,29 persen.

Keputusan pemerintah untuk melaksanakan otonomi daerah mulai memperlihatkan hasil, walaupun penurunan tingkat pengangguran tersebut belum mengatasi seluruh masalah kemiskinan. Walau demikian, tingkat pengangguran di kabupaten/kota masih mengalami fluktuasi. Ini dikarenakan potensi yang dimiliki setiap daerah itu berbeda-beda, seperti Kabupaten Badung walaupun mengalami fluktuasi tetapi tingkat fluktuasi yang dialami tidak begitu besar jika dibandingkan

dengan Kabupaten Jembrana yang pada tahun 2013 mengalami tingkat pengangguran yang paling tinggi, yaitu sebesar 3,39 persen. Kabupaten Badung pada tahun 2013 menempati tingkat kedua pengangguran terbuka terendah setelah Kabupaten Bangli, dikarenakan tingkat tenaga kerja Kabupaten Badung lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Bangli. Kabupaten Jembrana walaupun dari PAD, dana perimbangan serta belanja tidak langsungnya meningkat tetap saja tingkat penganggurannya meningkat. Hal ini dikarenakan Kabupaten Jembrana lebih menekankan pada pendidikan, agar nantinya dapat mengurangi tingkat pengangguran yang terbukti pada tahun 2014 tingkat pengangguran Kabupaten Jembrana menurun (BPS Provinsi Bali, 2015).

Menurut Wiradyatmika dan Sudiana (2013), meningkatnya jumlah kemiskinan disebabkan dari semakin bertambahnya jumlah penduduk dan akibatnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang kurang memadai bagi penduduk usia kerja, sehingga akan menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Menurut Sukirno (2012:422), masalah pengangguran dapat diselesaikan dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Serta menurut Mankiw (2006:61), pertumbuhan ekonomi merupakan meningkatnya standar hidup suatu masyarakat yang dicirikan dengan meningkatnya kemampuan memproduksi barang dan jasa merupakan hal penentu produktivitas pada modal fisik.

Peningkatan pendapatan asli daerah dan belanja tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sesuai dengan hukum Wagner yang mengatakan bahwa, tidak sepenuhnya dalam meningkatkan pengeluaran pemerintah disebabkan dari pendapatan per kapita (Mangkoesoebroto, 1993:171).

Selain itu peran pemerintah semakin penting untuk mengatur pengeluaran belanja daerah agar nantinya dapat diimbangi dengan pendapatan masyarakat yang tinggi pula. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap tingkat pengangguran melalui Belanja Tidak Langsung kabupaten/kota di Provinsi Bali. Peran pemerintah sangat diharapkan untuk mengurangi tingkat pengangguran, utamanya pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan dari latar belakang, sehingga dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. (a) Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Tidak Langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Bali? (b) Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Tidak Langsung terhadap tingkat Pengangguran pada kabupaten/kota di Provinsi Bali?(c) Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap tingkat Pengangguran melalui Belanja Tidak Langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Bali?

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah. (a) Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Tidak Langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, (b) Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Tidak Langsung terhadap tingkat Pengangguran pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, (c) Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap tingkat

Pengangguran melalui Belanja Tidak Langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan menjadi suatu media yang dapat mengembangkan konsep-konsep teori yang didapat selama menempuh perkuliahan sehingga dapat mengembangkan wawasan melalui beberapa temuan di lapangan yang sebelumnya belum terungkap tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Tidak Langsung serta pengaruhnya terhadap tingkat Pengangguran. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi sumangsih pemikiran untuk pemerintah utamanya yang terkait pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Tidak Langsung terkait tingkat Pengangguran.

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu. (a) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Tidak Langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, (b) Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Tidak Langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat Pengangguran pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, (c) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat Pengangguran melalui Belanja Tidak Langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

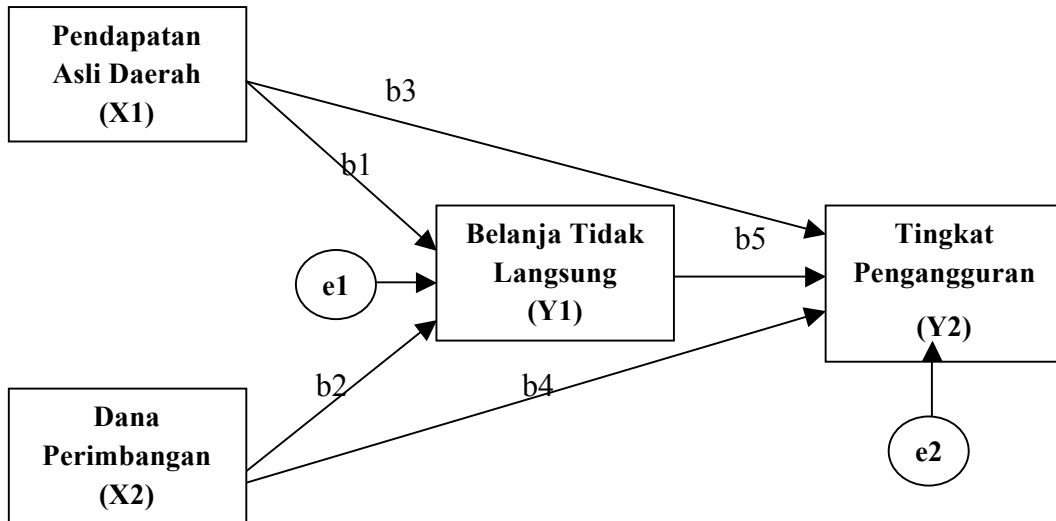
Lokasi dari penelitian ini adalah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Bali. Adapun alasan dipilihnya lokasi ini, karena Provinsi Bali merupakan daerah

yang memiliki tingkat pengangguran terendah di tingkat Nasional. Selain itu dapat dilihat pada Tabel 1 merupakan data tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Provinsi Bali masih ada yang berada di atas tingkat pengangguran provinsi, walaupun saat ini provinsi selalu mengalami penurunan untuk tingkat pengangguran.

Penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi non partisipan, yaitu dengan cara analisis catatan, analisis kondisi fisik dan analisis proses fisik yang berupa mencatat, mengamati dan mempelajari dari uraian dalam artikel, buku-buku, dan karya ilmiah berupa skripsi serta jurnal, dan dokumen-dokumen dari instansi terkait.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur (*path analysis*) adalah suatu pengembangan analisis regresi, dimana analisis regresi dikatakan sebagai bentuk khusus dari *path analysis*. *Path analysis* dipergunakan untuk menggambarkan dan melakukan pengujian terhadap model keterkaitan antar variabel yang berbentuk sebab akibat (Sugiyono, 2013:297). Analisis ini juga dipergunakan agar tahu akan hubungan langsung variabel independen terhadap variabel dependen serta hubungan yang tidak langsung melalui variabel intervening.

Gambar 1
Model Analisis Jalur



Berdasarkan Gambar 1, didapat persamaan struktural yang menunjukkan hubungan antar variabel yang dirumuskan yaitu.

$$Y_1 = b_1X_1 + b_2X_2 + e_1 \dots \dots \dots (1)$$

$$Y_2 = b_3X_1 + b_4X_2 + b_5Y_1 + e_2 \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

Y_1 = BelanjaTidakLangsung

X_1 = PendapatanAsliDaerah

X_2 = DanaPerimbangan

Y_2 = Tingkat Pengangguran

e_1, e_2 = variabelpengganggu

b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 = koefisienmasing – masingvariabel

Untuk menguji pengaruh tidak langsung digunakan uji sobel, uji sobel atau sering disebut dengan uji pengaruh tidak langsung merupakan cara untuk menguji kekuatan pengaruh tidak langsung antara variabel independen (X) terhadap

variabel dependen (Y2) melalui variabel intervening (Y1). Menentukan Standar Error Pengaruh Tidak Langsung

- a. Pengaruh Tidak Langsung X1 Melalui Y1 Terhadap Y2

$$S_{ae} = \sqrt{e^2 S_a^2 + a^2 S_e^2}$$

- b. Pengaruh Tidak Langsung X2 Melalui Y1 Terhadap Y2

$$S_{be} = \sqrt{e^2 S_a^2 + b^2 S_e^2}$$

- 1) Menghitung Nilai t-hitung

- a. Koefisien ae

$$Z = \frac{ae}{S_{ae}}$$

- b. Koefisien be

$$Z = \frac{be}{S_{be}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan melalui dua tahap, yaitu: (a) pengujian pengaruh langsung, yakni menguji pengaruh langsung pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja tidak langsung, pengaruh langsung pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja tidak langsung terhadap tingkat pengangguran serta (b) Pengaruh tidak langsung variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap tingkat pengangguran melalui variabel belanja tidak langsung, yang diuji dengan menggunakan uji Sobel. Hasil pengujian persamaan struktural 1 dan persamaan struktural 2 dapat dilihat di bawah ini yaitu di Tabel 2.

Hasil dari pengujian pada Tabel 2 yang menunjukkan pengaruh langsung pendapatan asli daerah terhadap belanja tidak langsung, diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,861 dan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ dari nilai probabilitas ($\alpha = 0,05$).

Tabel 2
Hasil Ringkasan Koefisien Jalur dan Signifikansi Hubungan Antar Variabel

Regresi	Koef. Reg. Standar	Standar Error	T. Hitung	P. Value	Keterangan
X1 → Y1	0,861	0,031	16,954	0,000	Signifikan
X2 → Y1	0,675	0,063	13,289	0,000	Signifikan
X1 → Y2	0,906	0,000	3,470	0,001	Signifikan
X2 → Y2	0,614	0,001	2,853	0,006	Signifikan
Y1 → Y2	-1,347	0,001	-4,887	0,000	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2015

Ini berarti H_0 ditolak H_1 diterima, artinya bahwa pendapatan asli daerah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja tidak langsung (Y_1). Pengaruh positif antara variabel pendapatan asli daerah terhadap belanja tidak langsung yang didapat pada penelitian ini sesuai dengan pendapat Mangkoesoebroto(1993:173), bahwa meningkatnya penerimaan pajak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Mawarni, dkk (2013), Prakosa (2004), dan Nugraeni (2011), berpendapat bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sehingga dapat mempengaruhi (ABD) terhadap pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Indonesia. Serta pendapat Abdullah (2003), menyatakan PAD mempengaruhi belanja daerah di Jawa-Bali.

Penelitian yang serupa menurut Sanghee (2010), Joulfaian & Mokeerjee, (1990); Legrenzi & Milas, (2001); Aziz *et al.*, (2000); Von Furstenberg *et al.*,

(1986), Blackley, (1986);. bahwa pendapatan daerah dapat berpengaruh terhadap anggaran belanja pada pemerintah daerah. Mehrara *et al.* (2011), Ollukayode (Inuwa, 2012), dan Husain (2013), menyatakan PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja daerah di Kabupaten Badung. Beberapa penelitian menemukan adanya pengaruh PAD terhadap belanja daerah, dan hal ini merupakan dalam konteks internasional, menurut Cheng (1999), di beberapa Negara yang termasuk wilayah Amerika Latin, bahwa pajak mempengaruhi belanja pada Pemerintah Daerah. Serta kenaikan pajak membuat belanja daerah akan meningkat, yang nantinya dapat meningkatkan deficit. Berdasarkan hasil analisis di tersebut, dapat dijelaskan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Bali mampu meningkatkan belanja tidak langsung, dimana, pendapatan asli daerah meningkat, maka belanja tidak langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Bali ikut meningkat. Ini berarti pembangunan yang dilaksanakan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali sudah berhasil.

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 2 pengaruh langsung dana perimbangan terhadap belanja tidak langsung, didapat nilai dari *standardized coefficient beta* sebesar 0,675 dan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ dari nilai probabilitas ($\alpha = 0,05$), ini berarti H_0 ditolak H_1 diterima, artinya dana perimbangan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja tidak langsung (Y_1). Sesuai dengan tujuan dari dana perimbangan, yaitu untuk mengurangi kesenjangan fiskal dan keseimbangan keuangan antar Pemerintah Menurut Bradford & Oates, (1971), secara teoritis pengalokasian sumber dana yang dilakukan secara alokatif akan sama dengan pengalokasian dana lainnya,

seperti pendapatan pada pajak akan memberi dampak yang sesuai. Daerah agar nantinya dapat dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini dapat melalui belanja tidak langsung menurut pasal 3 ayat 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta didukung dari hasil penelitian Prakosa (2004), Nugraeni (2011), dan Mawarni (2013), menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus atau Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sehingga mempengaruhi ABD pemerintah daerah di kabupaten/kota. Pembahasan tentang pengaruh transfer yang telah berjalan kurang lebih 30 tahun dalam bentuk dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat mengenai keputusan Pemerintah Daerah (Gamkhar & Oates, 1996). Hasil analisis tersebut, dapat dijelaskan bahwa peningkatan dana perimbangan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali mampu meningkatkan belanja tidak langsung. Dalam penelitian ini dana perimbangan merupakan salah satu indikator dari meningkatnya belanja tidak langsung.

Berdasarkan pengujian pada Tabel 2 pengaruh langsung pendapatan asli daerah terhadap tingkat pengangguran, didapat nilai dari *standardized coefficient beta* sebesar 0,906 dan nilai probabilitas sebesar $0,001 < 0,05$ dari nilai probabilitas ($\alpha = 0,05$), ini menandakan H_0 ditolak H_1 diterima, artinya pendapatan asli daerah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran (Y_2). Mendukung teori hipotesis Kuznet pertama, setiap terjadinya peningkatan pendapatan akan diiringi oleh peningkatan kesenjangan dalam jangka pendek, serta hasil penelitian dari Azumar (2011), pada hasil penelitiannya juga

didapat hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Hubungan positif dan signifikan antara variabel pendapatan asli daerah terhadap tingkat pengangguran yang diperoleh dalam penelitian ini, karena pendapatan asli daerah yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat tidak langsung dipergunakan untuk mengurangi tingkat pengangguran, melainkan pengalokasiannya lebih diarahkan ke kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan pendidikan gratis, pengobatan dan tunjangan lainnya. Agar nantinya dapat terciptanya lapangan pekerjaan dengan tenaga terdidik.

Hasil tersebut tidak sesuai dengan teori hipotesis Kuznet, bahwa akan terjadi penurunan kesenjangan dalam pendapatan dalam jangka panjang pada peningkatan pendapatan, serta didukung pendapat Setiyawati (Kresnandra dan Erawati, 2013), apabila suatu daerah dapat mengelola hasil daerah dengan baik akan membuat daerah meningkatkan sector-sektor yang ada, sehingga daerah dapat mengurangi pengangguran di daerahnya masing-masing. Penelitian Santosa (2013), bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di 33 provinsi di Indonesia. Peningkatan pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam penelitian ini menunjukkan pendapatan asli daerah belum dikelola dengan baik dan pendistribusian potensi daerah masing-masing sehingga masih banyak masyarakat yang belum sejahtera oleh daerah masing-masing serta masih banyaknya tingkat pengangguran walau dari tahun ketahun di tingkat provinsi selalu mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 2 pengaruh langsung dana perimbangan terhadap tingkat pengangguran, didapat nilai dari *standardized coefficient beta* sebesar 0,614 dan nilai probabilitas sebesar $0,006 < 0,05$ dari nilai probabilitas ($\alpha = 0,05$), ini berarti belanja tidak langsung (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran (Y_2). Adanya hubungan positif dan signifikan pada pengaruh dana perimbangan terhadap tingkat pengangguran dalam penelitian ini, seperti halnya pendapatan asli daerah, dana perimbangan pada pengalokasiannya lebih diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan daerah lainnya. Hanya saja apabila dialokasikan dulu ke belanja tidak langsung maka akan langsung kearah kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dana perimbangan secara langsung belum dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori dari Harrod-Domar (Sukirno, 2006:256), peranan dalam pembentukan suatu modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan Hugh Patrick (Todaro dan Smith, 2006:310), dalam pembangunan sektor keuangan, untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi di masa-masa awal pembangunan modern, namun bila system keuangan yang stabil ada, sehingga akan mengarahkannya ke sektor riil. Akan tetapi ada pula dukungan dari penelitian ini oleh penelitian dari Mase (2003), Wantchhekon dan Tamar (2002), menyatakan ketidak seimbangan fiskal horizontal cenderung meningkat, dikarenakan dana transfer yang diberikan kesetiap daerah tidak mempertimbangkan kapasitas fiskal, tetapi cenderung berdasarkan pada jumlah rumah tangga miskin dan jumlah populasi. Berdasarkan hasil penelitian di ini, maka alokasi dana perimbangan belum dapat mengalokasikan terhadap

peningkatan kesejahteraan sehingga belum mampu mengurangi tingkat pengangguran. Dana perimbangan dalam penelitian ini tidak merupakan indikator penurunan tingkat pengangguran. Namun dana perimbangan dialokasikan untuk investasi jangka panjang, yang nantinya juga akan mengurangi tingkat pengangguran namun tidak secara langsung, akan tetapi memerlukan proses. Berdasarkan perhitungan pada Tabel 2 pengaruh langsung belanja tidak langsung terhadap tingkat pengangguran, diperoleh nilai dari *standardized coefficient beta* sebesar -1,347 dan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ dari nilai probabilitas ($\alpha = 0,05$), ini berarti H_0 ditolak H_1 diterima, artinya belanja tidak langsung (Y_1) berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat pengangguran (Y_2). Sesuai dengan teori dari Keynes, terjadinya penurunan tingkat upah, akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Terjadinya penurunan daya beli masyarakat akan menyebabkan tidak terciptanya tenaga kerja penuh (*Full Employment*). Sistem perekonomian akan menurun apabila terjadi hal tersebut sehingga tenaga kerja yang dipergunakan juga berkurang yang mengakibatkan terjadinya pengangguran. Hasil tersebut juga didukung oleh Setyawati dan Hamzah (2007), meningkatnya belanja pembangunan akan dapat menekan jumlah pengangguran, serta menurut Suryadarma dan Suryahadi (2007), pertumbuhan pengeluaran swasta beserta sektor publik dapat mengurangi kesenjangan masyarakat lebih cepat dengan mengandalkan belanja publik. Meningkatnya belanja tidak langsung dapat mengurangi tingkat pengangguran. Belanja tidak langsung yang tinggi akan mensejahterakan masyarakat.

Dalam penelitian ini belanja tidak langsung merupakan indikator penurunan tingkat pengangguran. Banyak usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penurunan tingkat pengangguran seperti dengan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah dan nantinya akan diberikan modal untuk membiayai usaha yang akan dilakukan setelah melakukan pelatihan, agar nantinya masyarakat dapat menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Adapula program pemerintah yaitu *Job Fair*, dimana disediakan puluhan perusahaan yang mencari pekerja, sehingga memudahkan masyarakat dalam menemukan pekerjaan yang tepat dengan kemampuan yang dimiliki. Pelatihan dan *Job Fair* tersebut merupakan program unggulan dari Dinas Ketenaga kerjaan. *Job Fair* yang lebih dari enam kali diadakan setiap tahunnya membuktikan keseriusan pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran. Selain kedua program unggulan dari pemerintah masih banyak program lainnya yang merupakan program untuk mengurangi tingkat pengangguran, seperti program untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, program untuk meratakan penempatan tenaga kerja agar tidak terjadinya ledakan di suatu wilayah, baik itu di dalam maupun luar Negeri, program untuk melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja agar tingkat produktivitas dalam bekerja tetap seimbang, program pengembangan wilayah, sehingga suatu wilayah dapat dimanfaatkan keunggulannya dan akan meningkatkan pendapatan daerah serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru serta program dalam melakukan pendataan administrasi kependudukan (Disnaker, 2010).

Penggunaan indikator koefisien determinasi total berfungsi untuk menguji validitas model:

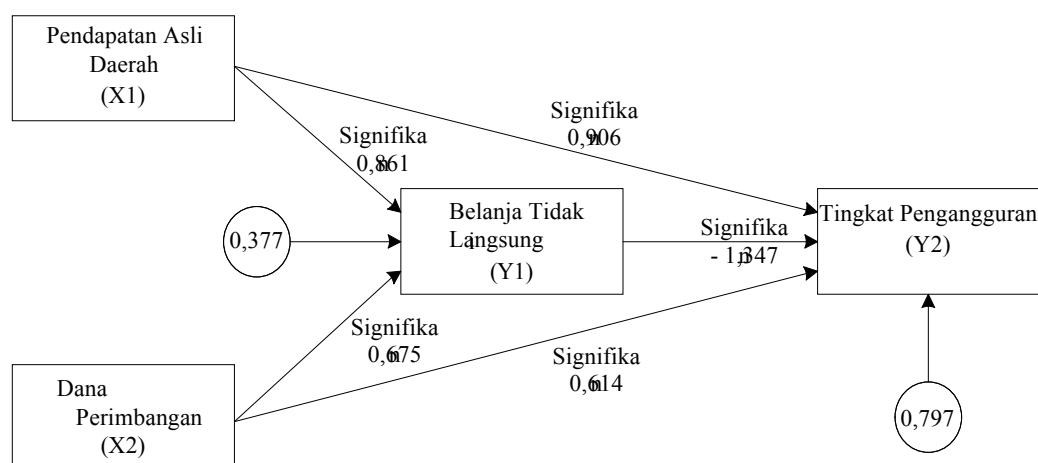
$$\begin{aligned} R_m^2 &= 1 - (e_1)^2 - (e_2)^2 \\ &= 1 - (0,377)^2 - (0,797)^2 \\ &= 0,909 \end{aligned}$$

Keterangan :

R_m^2 = Koefisien determinasi total
 e_1, e_2 = Nilai kekeliruan taksiran standar

Berdasarkan nilai dari koefisien determinasi total yang diperoleh, sehingga diperoleh keragaman data yang diterangkan dari model yaitu sebesar 91 persen atau informasi yang terdapat pada data sebesar 91 persen yang diterangkan dari model, sedangkan sisanya 9 persen diterangkan dari variabel lain yang tidak terkandung pada model.

Gambar 2
Diagram Hasil Analisis Jalur



Sumber: Tabel 2

Pengujian pengaruh tidak langsung pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap tingkat pengangguran melalui belanja tidak langsung

dilihat melalui nilai z dari koefisien ab , yang diperoleh dengan menghitung nilai S terlebih dahulu.

Tabel 3
Hasil Ringkasan Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh Antarvariabel	Variabel Mediasi	Sab	Z	Keterangan
$X_1 \rightarrow Y_2$	Y_1	0,0417	27,812	Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_2$	Y_1	0,0849	10,709	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan dari Tabel 3, secara absolut Z hitung sebesar $27,812 > 1,96$, H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya belanja tidak langsung (Y_1) merupakan variabel intervening pada pendapatan asli daerah (X_1) terhadap tingkat pengangguran (Y_2) di Provinsi Bali atau dengan kata lain pendapatan asli daerah berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat pengangguran melalui belanja tidak langsung. Ini dikarenakan meningkatnya pendapatan asli daerah yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung mempengaruhi penurunan tingkat pengangguran.

Berdasarkan Tabel 3, secara absolut Z hitung sebesar $10,709 > 1,96$, H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya belanja tidak langsung (Y_1) merupakan variabel intervening pada dana perimbangan (X_2) terhadap tingkat pengangguran (Y_2) di Provinsi Bali atau dengan kata lain dana perimbangan berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat pengangguran melalui belanja tidak langsung. Ini dikarenakan meningkatnya dana perimbangan yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung mempengaruhi penurunan tingkat pengangguran.

Secara langsung variabel independen berpengaruh sangat nyata terhadap variabel mediasi dan variabel mediasi berpengaruh sangat nyata terhadap variabel dependen, maka keadaan pada hasil penelitian ini merupakan *partial mediation*.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya maka, dapat ditarik simpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut. (a) Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja tidak langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, (b) Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan belanja tidak langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, (c) Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran melalui belanja tidak langsung pada kabupaten/ kota di Provinsi Bali.

Dari pembahasan dan simpulan yang telah disampaikan di atas, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut. (a) Meningkatnya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan diperlukan untuk peningkatan belanja tidak langsung yang merupakan suatu anggaran guna mensejahterakan masyarakat. Pendapatan asli daerah yang dikelola dengan tepat serta dapat dialokasikan dengan tepat oleh pemerintah, sehingga pengalokasiannya lewat belanja tidak langsung akan menurunkan tingkat pengangguran, (b) Peningkatan dana perimbangan yang diperoleh suatu daerah tentunya harus dapat mengimbangi dari pemasukan daerah yang lainnya. Setiap dana yang diperoleh tentunya dipergunakan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana yang diperoleh harus dapat dikelola dengan baik melalui belanja tidak langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (c) Pentingnya pengalokasian dana yang tepat utamanya dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dalam perannya mengurangi tingkat pengangguran, walaupun belum dapat mengurangi tingkat pengangguran, peran pengalokasian dana tersebut sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Pendapatan asli daerah di Provinsi Bali ternyata belum dapat mengurangi tingkat pengangguran bila belum terlaksananya pengalokasian yang tepat. Selain itu dana yang di dapat tentunya tidak langsung dipergunakan untuk satu hal tertentu, haruslah melalui proses sehingga tercapainya apa yang diharapkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Syukriy & Abdul Halim, 2003, "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Bali", *Simposium Nasional Akuntansi VI*, Surabaya, hal.1140-1159.
- Aziz, Mariam Abdul, Muzafar Shah Habibullah, W.N.W. Azman-Saini & M. Azali, 2000, "The causal relationship between tax revenues and government spending in Malaysia", *University Putra Malaysia, Working Paper*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali . 2008. *Statistik Ketenaga Kerjaan*. Denpasar.
- , 2008. *Bali Dalam Angka*. Denpasar
- , 2009. *Bali Dalam Angka*. Denpasar
- , 2010. *Bali Dalam Angka*. Denpasar
- , 2011. *Bali Dalam Angka*. Denpasar
- , 2012. *Bali Dalam Angka*. Denpasar
- , 2013. *Bali Dalam Angka*. Denpasar
- , 2014. *Bali Dalam Angka*. Denpasar

Badan Pusat Statistik Nasional.2014. <http://bps.go.id>.Diunduh pada 23 Mei 2015

Blackley, P, 1986, "Causality between revenues and expenditures and the size federal budget", *Public Finance Quarterly* 14: 139-156.

Bradford, D & Oates, W, 1971a, "The analysis of revenue sharing in a new approach to collective fiscal decision", *Quarterly Journal of Economics* 83 (3).

Cheng, Benjamin S, 1999, "Causality between taxes and expenditure: Evidence from Latin American Countries", *Journal of Economics and Finance* 23 (2) : 184-192.Gamkhar, Shama & Oates Wallace, 1996, "Asymetries in the response to increase and decrease in governmental grant : Some empirical findings", *National tax Journal* 49 (4): 501-512.Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali. 2010. <http://www.disnakertrans.baliprov.go.id/id/Program-Kerja2>. Diunduh pada 22 September 2015

Friedman, M, 1978, "The limitation of tax limitation", *Policy Review* 5 (summer): 7-14.

Hakim, Abdul.2002.*Ekonomi Pembangunan*.Yogyakarta: Ekonisia

Hoover, Kevin D & steven M Sheffrin, 1992, "Causation, spending, and taxes: Sand in the Sandbox or tax collector for the welfare state?", *The American economics Review* 82 (1): 225-248.Husain, Walidun. 2013. The Influence of Local Taxes and Levies Towards Expenditure Allocation in Kota Gorontalo, *Indonesia. Journal*, 15(2), pp: 190-201

Inuwa, Nasiru. 2012. Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria: Cointegration Analysis and Causality Testing. *Academic Research International*,. 2(3), pp: 718-723

Jhingan, M. L.2002.*Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*.Edisi VIII, Jakarta: CV Rajawali

Joulfaian, D & R. Mookerjee, 1990, "The intertemporal relationship between state and local government revenues and expenditures: Evidence from OECD countries", *Public Finance* 45: 109-117.

Karanassou, Marika, Hector Sala and Dennis J. Snower. 2005. A Reappraisal of The Inflation-Unemployment Trade Off. *European Journal of Political Economy*.Vol. 21.Issue. 1, pp.1-32.

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

http://www.kpu.go.id/.../UU_32_2004_Pemerintahan_Daerah.pdf.

Diunduh pada 26 Mei 2015

-----, 2004. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. <http://www.perbendaharaan.go.id>. Diunduh pada 26 Mei 2015

Legrenzi, Gabriella & Costas Milas, 2001, "Non linier and Asymetric adjustment in the local revenue-expenditure models: Some evidence from the Italian municipalities", *University of Milan, Working Paper*.

Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, *Economic Development and Cultural Change Chicago*. Vol. 49. Pg. 1

Mahyuddin. 2009. Analisis Vector Auto Regressive (VAR) terhadap Korelasi Antara Belanja Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan, Tahun 1985-2005. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10, No. 1, Juni 2009.

Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja tidak langsung pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*

Mangkoesebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Mankiw, N. Gregory. 2006. *Principles of Economics Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

Mase, Khulukekile. 2003. Equitable Share? An Analysys Of South Africa's System Of Fiscal Transfer To Local Government In Term Of How it Adresses Vertical and Horizontal Fiscal Imbalance. *International Development Department.School Of Public Policy.University of Birmingham*.

Mawarni, Darwanis dan Abdullah, Syukriy. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi*. Pascasarjana Universitas Syah Kuala

Mehrara, Mohsen, Mosayeb Pahlavani, and Youset Elyasi. 2011. Government Revenue and Government Expenditure Nexus in asian Countries: Panel

Cointegration and Causality. *International Journal of Business and Social Science*, 2(7), pp: 199-207

Nugraeni. 2011. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Akmenika Upy*. Volume 8

Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja tidak langsung (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY). *JAAI Volume 8 No. 2*, Desember 2004

Pramusinta, Elsa Betha. 2012. Analisis Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk dan Dependency Ratio Dengan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Pada Tahun 1986-2008. *Skripsi. Semarang*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Sanghee, Park. 2010. The Choice for Scrutiny in Local Revenue Decisions : Case for California Counties 2001-2010. *Journal*, pp:1-33

Santosa, Budi. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 5, No. 2

Setyawati, Anis dan Ardi Hamzah. 2007. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Vol. 4, No. 2 hal. 211-228

Sopianti, Ni Komang dan A.A. Ketut Ayuningsasi. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, dan Upah Minimum terhadap Jumlah Pengangguran Di Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 2 [4] : 216-225

Subandi. 2008. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta

Sukirno, Sadono. 2012. *Makroekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.

Suryadarma, Daniel dan Suryadi, Asep. 2007. The Impact of Private Sector Growth on Poverty Reduction: Evidence from Indonesia. *SMERU Working Paper*

Syamsuddin dan Anton A Setyawan. 2008. Foreign Direct Investment (FDI), Kebijakan Industri dan Masalah Pengangguran: Studi Empirik di

Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol.9, No.1, Hal. 107-119.
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jawa Tengah.

Von Furstenberg, George M,R. Jeffery Green & Jin-Ho Jeong, 1986, "Tax and spend, or spend and tax?", *The review of Economics and statistic* 67: 33-40.

Wantchhekon, Leonardo and Tamar Asadurian. 2002. Transfer Dependence and Regional Disparitas: The Case Of Nigeria. *Working Paper* No. 152. Stanford University

Wiradyatmika, A.A. Gede Alit dan I Ketut Sudiana. 2013. Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal EP Unud*, 2 [6] :344-349.